

TEROBOSAN AGAR BERUMUR PANJANG

Sistem Terasering Diterapkan di TPST Piyungan

PIYUNGAN (KR) - Pemerintah menempuh berbagai cara supaya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul sanggup menampung sampah hingga beberapa tahun kedepan.

Sebenarnya lahan TPST Piyungan seluas 10 hektare tidak mampu lagi menerima gelontoran sampah yang sehari kisaran 500 ton hingga 600 ton.

Sementara Komisi DPRD DIY mendesak pemerintah DIY memberikan kompensasi bagi masyarakat. Karena TPST Piyungan merupakan bagian dari *public service* bagi Pemda DIY.

Staf TPST Piyungan Bantul, Sumarwan, Selasa (12/1), mengungkapkan konsep pembangunan TPST Piyungan bakal dibuat terasering. Sehingga umur TPST bisa diperpanjang beberapa tahun kedepan.

"Kita terus berupaya

memutar otak agar TPST Piyungan ini bisa dioptimalkan hingga beberapa tahun kedepan," ujar Sumarwan.

Tanpa penataan khusus, sampah sulit dibuang di kawasan ini. Oleh karena itu, diputuskan untuk menata kawasan TPST menggunakan terasering. "Ketika puncak tertinggi mencapai 148 meter itu penuh, sampah masuk dihentikan," ungkapnya.

Menurut Sumarwan untuk saat ini program pembuatan terasering sudah berjalan. Dengan demikian, pembuangan sampah ke TPST kedepannya tidak mengalami hambatan.

Terpisah anggota Komisi

C DPRD DIY, H Amir Syarifudin, mengatakan pembangunan fisik di TPST Piyungan merupakan sebuah keharusan. Politisi PKS tersebut juga minta agar kualitas pembangunan juga diperhatikan. Sehingga kedepannya TPST bisa dimanfaatkan hingga beberapa tahun mendatang.

Menurut Amir, tidak kalah penting yang harus dirancang mulai sekarang adalah perluasan area TPST. Pada dasarnya, keberadaan TPST sudah overload antara kapasitas dengan volume sama masuk tidak seimbang.

"Paling efektif dengan pengolahan sampah, bukan sekadar ditimbun. Kalau hanya ditimbun beberapa tahun kedepan TPST sudah habis areanya. Ketika dilakukan pengolahan sampah otomatis umur TPST akan semakin panjang," ujar Amir. (Roy)-f



KR-Sukro Riyadi

Alat berat mulai beraktivitas di TPST Piyungan, Selasa (12/1).

6.329 Nakes Siap Divaksin

BANTUL (KR) - Sebanyak 6.329 tenaga kesehatan (nakes) siap dilakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Bantul.

Kepala Seksi (Kasi) Surveilans dan Imunisasi Dinkes Bantul, dr Abednego Dani, Selasa (12/1), menuturkan berdasarkan data, vaksinasi tahap pertama dilakukan bagi nakes yang sudah terdaftar tersebut.

Ditanya kesiapan fasilitas kesehatan (faskes), Abednego menyebutkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bantul untuk pertama kalinya direncanakan di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS).

Adapun vaksinasi awal dilakukan kepada 10 orang yakni pejabat, to-

koh masyarakat dan satu perwakilan pedagang pasar. Setelah itu, dilanjutkan dengan nakes lain yang sudah masuk dalam daftar penerima vaksin. Selain RSPS, imbuhan Abednego, Kabupaten Bantul telah menyediakan 34 faskes yakni 27 puskesmas, 6 RS dan 1 klinik untuk melayani program vaksinasi.

Dari jumlah sekian ini, membutuhkan dua tenaga SDM kesehatan minimal 2 orang tiap faskes sehingga total tenaga SDM Kesehatan terdidik yang dibutuhkan di Bantul untuk program vaksinasi sebanyak 68 SDM kesehatan.

"Kalau mau ideal, satu faskes terdiri dari 8 SDM Kesehatan. Sebe-

narnya vaksinasi ini secara teknis sama seperti program vaksinasi lainnya. Namun karena vaksinasi ini dilakukan secara khusus karena memang terjadi pandemi sehingga harus ada vaksin ini sehingga dilaksanakan memakai alur dan protap secara khusus," paparnya.

Abednego juga menegaskan kepada warga untuk tidak mempercayai hoax dan hal nonproduktif yang dapat mengganggu kelangsungan program vaksinasi demi tercapainya *herd immunity* bagi warga di Kabupaten Bantul. "Vaksin sudah dijamin aman digunakan oleh MUI dan BPOM sehingga warga tak perlu khawatir," tegasnya. (Aje)-f

Pelanggar PTKM Bakal Dapat Sanksi



KR-Sukro Riyadi

Petugas Satpol PP Bantul mensosialisasikan Instruksi Bupati No 1 Tahun 2021.

BANTUL (KR) - Belum redanya penyebaran Covid-19 memperberat beban yang harus dipikul masyarakat. Hampir semua sektor kena imbasnya, ada usaha berhenti sementara, ada pula yang sudah gulung tikar. Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) tentu membuat kondisi makin runyam. Di sisi lain, protokol kesehatan (Prokes) harus ditegakkan demi kesehatan masyarakat.

Kapolsek Bambanglipuro, AKP Khabibulloh SPdI MM, Selasa (12/1), menjelaskan sejak awal pihaknya mendorong masyarakat melaksanakan Prokes. "Babinkamtibmas terus kami minta memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya melaksanakan prokes dalam aktivitas sehari-hari. Tapi kami juga minta anggota Bhabinkamtibmas mengutamakan kesehatan diri masing-masing," ujarnya.

Bagaimanapun ujung tombak melawan Covid-19 tidak hanya dari unsur Polri, harus dilakukan bersama-sama mulai dari level RT, dukuh, kalurahan, kecamatan hingga pemerintah kabupaten dan masyarakat. Oleh karena itu sejak kebijakan PTKM diberlakukan, jajaran Polsek Bambanglipuro bersama instansi lainnya bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat.

Terobosan lain agar sosialisasi Prokes berjalan efektif, Khabibulloh mengulirkan program safari Jumat serta Salat

Dhuhur sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Sementara Kasat Pol PP Kabupaten Bantul, Yulius Suharta, mengatakan sejak Instruksi Bupati No 1 Tahun 2021 turun, koordinasi dilaksanakan bersama Kodim, Polres Bantul, bagian hukum. agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan ketegasan Satpol PP di lapangan. Masyarakat diminta patuh pada aturan yang tertuang dalam Instruksi No 1 Tahun 2021 tersebut. Jika di lapangan terjadi pelanggaran tentu ada sanksinya.

"Ketika prokes sudah dilaksanakan dengan baik, tapi ada pelanggaran soal waktu sanksi penutupan 1 kali 24 jam. Lain halnya ketika Prokes tidak dijalankan dengan baik ditambah pelanggaran jam tutup sanksi bisa penutupan hingga 3 kali 24 jam," ujar Yulius.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, M Agung Kurniawan, menambahkan personel Satpol PP menggelar operasi patuh Covid -19 di sejumlah lokasi. Sasarannya beberapa swalayan di Kapanewon Banguntapan hingga Pasar Tradisional Bantengan.

Dalam kegiatan itu, tim memberikan imbauan penerapan Prokes lebih ketat kepada masyarakat. "Petugas memberikan imbauan sosialisasi, edukasi kepada pengelola usaha, pemilik toko swalayan sesuai instruksi bupati. (Roy)-f

Banguntapan Antisipasi Klaster Pernikahan



KR-Rahajeng Pramesi

Camat Kapanewon Banguntapan, Fauzan Muarifin.

BANTUL (KR) - Kapanewon Banguntapan mengimbau warganya untuk mewaspadai adanya klaster pernikahan. Camat Kapanewon Banguntapan, Fauzan Muarifin, Senin (11/1), menuturkan terkait dengan masih terjadinya pandemi Covid-19 saat ini mulai terdeteksi penyebaran dari klaster pernikahan.

"Ada beberapa pasang pengantin yang terpapar positif Covid-19. Sebagian isolasi di shelter dan sebagian karantina

mandiri di rumah masing-masing. Di Kapanewon Banguntapan ada pengantin yang berkediaman di Mantup Baturetno mereka tengah menjalani isolasi mandiri," ungkapnya.

Adapun klaster pernikahan ini sangat mungkin terjadi karena saat resepsi pernikahan yang paling lama berada di lokasi resepsi adalah pengantin dan keluarga. Mereka bertemu dengan semua tamu undangan yang bisa jadi salah satu atau sebagian tamu undangan tersebut adalah positif Covid-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Bupati Bantul No 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dan untuk mencegah penularan Covid-19, maka kami meminta pelaksanaan pernikahan cukup dengan sederhana yaitu ijab-qabul, dengan tamu terbatas," paparnya.

Fauzan juga mengimbau acara syukuran pernikahan bisa dilakukan cukup dengan membagi makanan kepada keluarga dan tetangga sekitar. "Adapun prosesi pernikahan tidak perlu dengan acara tambahan pentas seni dan sejenisnya," paparnya. (Aje)-f

JAMIN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pemkab Bantul Umumkan RUP di Aplikasi 'Sirup'

BANTUL (KR) - Guna menjamin akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2021. Adapun pengumuman dilakukan melalui website resmi sirup.lkpp.go.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmy Jamharis kepada KR, Selasa (12/1), menuturkan pihaknya juga mengumumkan daftar paket belanja melalui pengadaan barang dan jasa. Adapun total belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul sebanyak Rp 2,3 triliun.

Diungkapkan Sekda, rincian belanja daerah di antaranya total belanja barang dan jasa yang melalui swakelola sebesar Rp 1,8 triliun, pengadaan melalui beberapa penyedia dikategorikan ada beberapa seperti tender ada 145 paket pekerjaan dengan nominal sebesar Rp 172 miliar, tender cepat ada 3 paket pekerjaan dengan nominal 3,3 miliar.

Seleksi ada 7 paket pekerjaan dengan nominal Rp 2,1 miliar, e-purchasing ada 117 paket pekerjaan dengan nominal Rp 45 miliar dan pengadaan langsung ada 1.183 paket pekerjaan dengan total nominal Rp 111 miliar.

"Sementara pengadaan dengan metode tender berdasarkan jenis



KR-Rahajeng Pramesi

Bupati dan Wakil Bupati Bantul saat rapat pengumuman RUP secara virtual.

yang barang ada 9 paket pekerjaan senilai Rp 15 miliar, konstruksi ada 134 paket dengan nilai Rp 159 miliar, jasa lainnya ada 5 paket dengan nominal Rp 2,1 miliar," jelasnya.

Sedangkan dari seleksi ada konsultasi dengan 7 paket pekerjaan senilai Rp 2,1 miliar dan tender cepat dengan jenis barang sebanyak 3 paket pekerjaan senilai Rp 3,3 miliar.

"Jenis terbanyak ada pada paket pekerjaan konstruksi, karena kita banyak pekerjaan yang harus terselesaikan seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan, gedung, pengairan dan beberapa pekerjaan

fisik lain," urai Helmy.

Dari sekian proyek tersebut, fokus pembangunan ada di 3 hal yakni pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan dan pengairan. Adapun tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bersifat terbuka secara umum dan nasional sehingga pemenang tender tidak harus warga Bantul.

"Asalkan peserta lelang memenuhi syarat dan ketentuan dapat ikut seleksi, sehingga pemenang tender ini beberapa di antaranya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan sebagainya," papar Helmy. (Aje)-f



KR-Rahajeng Pramesi

Rapat pengumuman RUP di ruang bupati guna mewujudkan sistem yang akuntabel dan transparansi.